

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Karawang Gelontorkan Rp2,3 M untuk Asuransi Pertanian
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Karawang
Sumber / Hal	: Republika/hal.22
Edisi	: Senin, 30 April 2018

Karawang Gelontorkan Rp 2,3 M untuk Asuransi Pertanian

● ITA NINA WINARSIH

KARAWANG —Pemkab Karawang, menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2,3 miliar untuk asuransi pertanian. Anggaran tersebut dialokasikan dari APBD kabupaten. Dengan adanya asuransi ini diharapkan petani menjadi terproteksi. Terutama saat mereka mengalami gagal tanam ataupun gagal panen. Bupati Karawang Cellica Nurachadiana, mengatakan sektor pertanian ini sangat penting. Karenanya, pemda berupaya untuk memberikan perhatian lebih pada sektor ini. Termasuk pelaku usahanya yang tak lain adalah petani. Karena itu, setiap tahunnya pemda menggelontorkan anggaran Rp 2,3 miliar untuk asuransi pertanian. "Asuransi ini, diperuntukan bagi 60 ribu hektare sawah," ujar Cellica, kepada *Republika*, akhir pekan lalu.

Luas baku sawah di Karawang mencapai 97 ribu hektare. Sedangkan pemkab, baru bisa memproteksi melalui asuransi untuk 60 ribu hektare. Sisanya tercover oleh program CSR dari perusahaan. Itupun kalau semuanya yang 97 ribu hektare ini gagal tanam maupun gagal panen. Meskipun setiap tahun ada alokasi untuk asuransi, Cellica berharap di wilayahnya tidak ada bencana alam yang menyebabkan gagal tanam atau panen. Justru sektor pertanian di Karawang harus berhasil. Sebab sektor ini

mampu menyumbang bahan pangan untuk nasional. "Selain asuransi, bentuk lain perhatian kita untuk sektor pertanian yaitu dengan dibuatkannya Perda tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B)," ujar Cellica.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, M Hanafi Chaniago, mengatakan dari 60 ribu hektare yang jadi target untuk peserta asuransi, yang sampai saat ini sudah mendaftar baru 2.447 hektare. Saat ini kepesertaan asuransi akan terus didorong. "Kita terus sosialisasikan manfaat asuransi ini untuk para petani," ujar Hanafi.

Premi asuransi ini sebesar Rp 180 ribu per hektare per tahun. Untuk pembayaran premi ini, dilakukan sharing dengan pemerintah pusat. Adapun kemampuan APBD Karawang, yaitu membayar premi sebesar Rp 36 ribu per hektare. Sedangkan sisanya, yakni Rp 144 ribu merupakan bantuan dari pusat. Menurut Hanafi, asuransi ini bisa memproteksi tanaman padi yang rusak atau puso gara-gara bencana alam dan serangan hama. Misalkan, bencana banjir ataupun kekeringan. Maka, padi yang rusak ini bisa mendapat asuransi. Dengan begitu, petani bisa bernafas lega meskipun mereka gagal tanam atau panen. Sebab, kerusakan itu mendapat pembiayaan ganti dari asuransi.

■ ed: rachmat santosa basarah